



RESISTENSI TERHADAP NASIONALISME JEPANG: TANGGAPAN KRISTEN TERHADAP GERAKAN AMANDEMEN DI JEPANG¹

Surya Harefa
Tokyo Christian University
shharefa@gmail.com

Submit: 01-05-2021

Review: 06-05, 11-06-2021

Revisi: 04-06, 16-06-2021

Diterima: 17-06-2021

Layout: 21-06-2021

Terbit: 30-06-2021

Abstract

This article explores several responses of Japanese Evangelical Christians to Japanese nationalism, which tends to be fascist as appeared in the issue of constitutional revision. While commending their fights with this complicated issue, by using the critical contextualization approach from the discipline of intercultural theology, this article also shows their limitations in producing solutions to the deadlock between the camp fighting for the constitutional revision and those who resist the proposed amendments. The evangelical figure who uses Kuyperian principles such as the Christian worldview, common grace, and sphere sovereignty yields a response that is arguably more comprehensive and has prospects to be accepted by non-Christians, including the revisionist camp. To Japanese evangelicals who tend to withdraw from socio-political engagements, I argue for utilizing the ecclesiological suggestions of Abraham Kuyper. Particularly, his assertion to keep the church free from the state and Kuyper's distinction of the church's aspects between organism and institution, are beneficial to continue and develop participation in responding to the amendments and other inter-connected nationalism issues.

Keywords: Christianity in Japan; Amendment; Church and State; Abraham Kuyper; Nationalism

Abstrak

Artikel ini membahas beberapa tanggapan orang-orang Kristen Injili di Jepang terhadap bahaya nasionalisme Jepang yang cenderung bersifat fasis dan terlihat dari gerakan amendemen. Sementara mengapresiasi mereka yang berjuang dalam meresponi masalah yang rumit ini, dengan menggunakan metode pendekatan kontekstualisasi kritis dari disiplin teologi interkultural, artikel ini juga menunjukkan keterbatasan mereka dalam menghasilkan solusi bagi kebuntuan yang terjadi antara kubu yang memperjuangkan revisi konstitusi dan kubu yang menolak amendemen yang diusulkan. Tokoh Injili yang menggunakan prinsip-prinsip Kuyperian seperti wawasan dunia Kristen, anugerah umum, dan kedaulatan ruang lingkup menghasilkan respons yang lebih komprehensif dan berpotensi diterima juga di kalangan orang bukan Kristen, termasuk kubu revisionis. Kepada kaum Injili Jepang yang cenderung menarik diri dari partisipasi dalam masalah sosial politik, penulis mendorong penggunaan saran-saran eklesiologis dari Abraham Kuyper. Khususnya, penekanannya terhadap penjagaan independensi gereja terhadap negara dan pembedaan Kuyper terhadap aspek gereja sebagai organisme dan institutusi, bermanfaat untuk melanjutkan dan mengembangkan partisipasi dalam meresponi masalah amendemen beserta isu-isu terkait nasionalisme yang lainnya.

Kata Kunci: Kekristenan di Jepang; Amendemen; Gereja dan Negara; Abraham Kuyper; Nasionalisme

I. Pendahuluan

¹ Artikel ini merupakan terjemahan dengan beberapa penyesuaian bagi pembaca Indonesia dari Surya Harefa, "Resistance to Japanese Nationalism: Christian Responses to Proposed Constitutional Amendments in Japan," *Evangelical Review of Theology* 43, no. 4 (October 2019): 330-44.

Walaupun usulan amandemen sudah pernah diajukan berkali-kali, namun Jepang belum pernah merevisi konstitusi yang telah berlaku sejak tahun 1947 (Konstitusi 1947).² Partai berkuasa, yaitu *Jiyū-Minshutō* (Partai Demokrat Liberal, dalam literatur selain bahasa Jepang sering disingkat menjadi LDP), sejak tahun 1955 telah menegaskan bahwa Konstitusi 1947 tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Jepang dan oleh karenanya perlu diamandemen. Namun, beberapa partai dan kelompok masyarakat, termasuk orang-orang Kristen Injili di Jepang, melihat adanya bahaya nasionalisme yang cenderung bersifat fasis di balik gerakan amandemen dan oleh sebab itu mereka menentang usaha merevisi Konstitusi 1947.

II. Metode Penelitian

Artikel ini meneliti respons dari orang-orang Kristen Injili di Jepang terhadap gerakan amandemen. Studi ini merupakan bagian dari proyek penelitian dalam bidang teologi interkultural yang berpandangan bahwa orang Kristen dapat memperoleh manfaat dari orang Kristen lain yang berasal dari budaya dan bahkan zaman yang berbeda.³ Dengan pendekatan “kontekstualisasi kritis”⁴ riset ini menyelidiki secara kritis masing-masing konteks, yaitu konteks orang Kristen Injili di Jepang dan konteks Abraham Kuyper (1837-1920) di Belanda. Perhatian utama dari artikel ini adalah pada tanggapan orang-orang Kristen di Jepang terhadap gerakan amandemen. Diskusi lebih mendetail mengenai Kuyper dibahas di artikel lain.

Setelah menggambarkan posisi pendukung upaya amandemen, artikel ini mendiskusikan respons orang-orang Kristen Injili di Jepang terhadap gerakan amandemen, khususnya terhadap draf amandemen yang dirilis LDP pada tahun 2012 (Draf 2012). Analisis berfokus pada pandangan beberapa tokoh yang pernah mempublikasikan karya mereka melalui penerbit Injili *Inochi no Kotobasha*.⁵ Dalam bentuk evaluasi, penulis berargumen bahwa saran-saran eklesiologis Kuyper dapat bermanfaat bagi kaum Injili dalam melanjutkan perjuangan menghadapi gerakan amandemen dan masalah-masalah sosial politik lainnya.

III. Pembahasan

I. Gerakan Amandemen

Pada bulan Desember 2018, Perdana Menteri Abe Shinzō⁶ menyatakan tekadnya untuk melihat konstitusi Jepang diubah pada tahun 2020. Ia yakin bahwa merevisi Konstitusi 1947 akan mengembalikan Jepang ke masa kejayaannya. Abe pernah melontarkan pernyataan serupa pada beberapa kesempatan sebelumnya. Selama masa kampanye pada tahun 2012, misalnya, Abe melontarkan slogan *Nippon wo*

² Nama resminya ialah *Nihonkoku Kenpō* (Konstitusi Jepang). Juga disebut sebagai *Genkō Kenpō* (Konstitusi Saat Ini) sebagai kontras dari konstitusi yang berlaku sebelumnya.

³ Benno van den Toren, “Intercultural Theology as Three-Way Conversation: Beyond the Western Dominance of Intercultural Theology,” *Exchange* 44, no. 2 (2015): 124; Andrew F. Walls, “The Ephesian Movement: At a Crossroads in Christian History,” in *The Cross-Cultural Process in Christian History: Studies in The Transmission and Appropriation of Faith* (Maryknoll: Orbis, 2002), 79. Cf. Bevans, Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology* (Maryknoll: Orbis, 1992), 14–15.

⁴ Paul G. Hiebert, *Anthropological Insights for Missionaries* (Grand Rapids: Baker, 1986), 183–92. Awalnya, kontekstualisasi kritis adalah saran bagi para misionaris agar tidak menolak atau menerima kepercayaan dan kebiasaan lama dari orang-orang di ladang misi tanpa penelitian yang kritis. Hiebert berpendapat bahwa metodenya dapat digunakan juga untuk menangani isu-isu kontemporer.

⁵ Pemilihan atas penerbit Injili terbesar di Jepang ini adalah demi menjamin adanya pengakuan yang cukup luas di kaum Injili Jepang yang terdiri dari banyak kelompok denominasi.

⁶ Untuk nama orang Jepang, penulis menggunakan cara penulisan versi Jepang, yaitu nama keluarga mendahului nama pertama. Tetapi, untuk nama pengarang Jepang yang menulis literatur dalam bahasa Inggris, penulis mempertahankan metode penulisan catatan kaki versi Barat.

Torimodosu (Mengembalikan Jepang) dan mempromosikan amandemen konstitusi sebagai elemen penting dalam rencana kerja LDP.

Bagi LDP, Konstitusi 1947 merupakan suatu pemaksaan dari pihak asing. Douglas MacArthur (1880-1964), Panglima Tertinggi pemerintah pendudukan sekutu di Jepang, menolak rancangan konstitusi yang ditulis oleh komite para ahli konstitusi Jepang yang dipimpin oleh Matsumoto Jōji (1877-1954) pada bulan Februari 1946. Dalam waktu kurang dari seminggu, MacArthur kemudian mengajukan sebuah draf alternatif. Draft ini, dengan sedikit revisi, kemudian ditetapkan sebagai Konstitusi 1947. Draft Matsumoto berusaha mempertahankan ketentuan dari *Dai-Nippon Teikoku Kenpō* (Konstitusi Kekaisaran Jepang Agung)⁷ yang mengidentifikasi kaisar sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan rakyat Jepang sebagai *shinmin* (bawahan yang taat sepenuhnya). Sebaliknya, Draft MacArthur menempatkan rakyat Jepang sebagai pemegang kedaulatan dan menjadikan kaisar hanya sebagai simbol negara. Hal-hal di atas digunakan politisi LDP untuk mengembangkan narasi bahwa Konstitusi 1947 merupakan konstitusi yang “baru dan buruk,” dan tidak berdasarkan nilai-nilai Jepang yang “lama dan baik.”

Dalam dua dekade ini, LDP telah mengambil beberapa langkah signifikan untuk merealisasikan agenda amandemennya. Menyusul draf pertama amandemen yang diusulkan pada tahun 2005, partai tersebut berhasil mendapatkan persetujuan bagi undang-undang yang diperlukan dalam mengatur prosedur untuk mengubah konstitusi dari Parlemen Jepang pada tahun 2007. Kemudian LDP merilis draf kedua, yaitu *Nihonkokukentō Kaisei Sōan* (Draft untuk Amandemen Konstitusi Jepang), pada 27 April 2012. LDP menyebutkan bahwa komite amandemennya telah meninjau semua pasal dari Konstitusi 1947 dan dengan demikian mengklaim bahwa Draft 2012 yang mereka ajukan merupakan suatu “draft konstitusi yang direvisi sesuai dengan waktu dan keadaan Jepang saat ini” dan “akan membebaskan Jepang dari sistem yang ditetapkan selama masa pendudukan dan menjadikan Jepang benar-benar berdaulat.”⁸

Selain merevisi bagian pembukaan konstitusi, Draft 2012 mengajukan pasal-pasal baru sehingga 10 bab dan 103 pasal dari Konstitusi 1947 menjadi 11 bab dan 110 pasal. Pasal-pasal baru tersebut mengatur hal-hal seperti bendera dan lagu kebangsaan, hak memiliki kekuatan bersenjata demi kepentingan membela diri, penetapan Keadaan Darurat, dan prosedur amandemen. Draft 2012 juga memuat klausul mengenai kaisar sebagai kepala negara dan tanggung jawab keluarga untuk memastikan situasi kesejahteraan yang sehat.⁹

2. Tanggapan Orang Kristen Jepang

Tidak ada respons yang signifikan dari umat Kristen ketika LDP menerbitkan Draft 2012. Hal ini bukan hanya karena seluruh Jepang sedang berfokus pada pemulihan dari bencana tahun 2011, tetapi juga karena sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 LDP sedang tidak berada dalam posisi sebagai partai yang berkuasa.

Rasa krisis baru muncul menjelang pemilu tahun 2012. Saat itu, banyak orang Jepang yang menyadari bahwa pemerintahan oleh *Minshutō* (Partai Demokratis Jepang) tidak lebih baik dibanding pemerintahan oleh LDP. LDP kembali menarik perhatian juga karena Abe, yang telah dengan tiba-tiba mengundurkan diri sebagai perdana menteri

⁷ Konstitusi ini berlaku sejak tahun 1890 hingga tahun 1947 dan juga dikenal sebagai *Meiji Kenpō* (Konstitusi Meiji) atau *Kyū Kenpō* (Konstitusi Lama) dan dapat diakses di www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html (bahasa Jepang) atau www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c02.html (bahasa Inggris).

⁸ “LDP Announces a New Draft Constitution for Japan,” *Jimintō*, www.jimin.jp/english/news/117099.html, diakses 21 Februari 2017.

⁹ *Ibid.*

pada September 2007, tampak telah berubah menjadi pemimpin yang menjanjikan ketika berhasil memenangkan kembali jabatan sebagai ketua umum LDP pada September 2012.

Abe mengkampanyekan pengembalian Jepang kepada masa kejayaannya. Sebagaimana akan dibahas lebih detail, isi Draf 2012 mengindikasikan upaya untuk mengembalikan Jepang kepada beberapa kondisi pada periode Kekaisaran Jepang Agung (1868-1947). Pada periode tersebut, Jepang memang mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi dan teknologi. Namun, pada saat yang sama, Jepang juga melakukan berbagai invasi militer yang sangat menyengsarakan bangsa-bangsa Asia dan mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk dari rakyat Jepang juga.

Menyadari bahaya nasionalisme yang bersifat fasis ini, sebagian umat Kristen mulai menyuarakan keprihatinan. Misalnya, ketua dari denominasi *Nihon Baputesuto Renmei* (Konvensi [Gereja-Gereja] Baptis Jepang) mengirimkan pesan khusus demi menyadarkan anggota denominasi akan bahaya dari gerakan amandemen dan mengadakan persekutuan doa khusus untuk mendoakan perkembangan situasi menjelang pemilu di akhir tahun 2012.¹⁰ Selain persekutuan doa khusus, sepanjang tahun 2013, beberapa gereja dan organisasi Kristen mengadakan berbagai acara demi meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang bahaya yang mungkin terjadi.¹¹ Surat kabar Kristen *Kurisuchan Shinbun* mengangkat masalah amandemen konstitusi dengan serangkaian 25 artikel, dari edisi 14 April sampai edisi 13 Oktober 2013.¹²

Seperti para penentang gerakan amandemen lainnya, kekhawatiran utama umat Kristen Jepang juga berkaitan dengan revisi Pasal 9. Pasal ini dikenal sebagai pasal pasifis karena menetapkan Jepang sebagai negara damai tanpa memiliki hak untuk berperang. Berikut perbandingan isi pasal 9 dan amandemen yang diusulkan (terjemahan tidak resmi, penekanan ditambahkan):¹³

Konstitusi 1947:

(1) [Karena] mendambakan secara tulus perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, [maka] *untuk selama-lamanya* rakyat Jepang membuang perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan senjata sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional.

(2) Untuk mencapai tujuan ayat di atas, tentara angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi kekuatan perang lainnya *tidak akan pernah* dipertahankan. Hak negara untuk berperang *tidak* akan diakui.

¹⁰ Neda Shōichi, "Maegaki," in *Kurisuchan Toshite "Kenpō" wo Kangaeru*, ed. Kurisuchan Shinbun, by Asaoka Masaru et al. (Tokyo: Inochi no Kotobasha, 2013), 3.

¹¹ Seminar bertema "Apa yang Umat Kristen harus Kerjakan berkaitan dengan Amandemen?" di Gereja Baptis Keisen, Tokyo, yang diselenggarakan oleh denominasi Konvensi Baptis Jepang pada 27 Mei 2013, dihadiri oleh 60 peserta. Pada 29 Mei 2013, 50 tokoh agama Kristen, Budha, dan Shinto merilis pernyataan bersama untuk menentang amandemen Pasal 96 dan 9. Pada tanggal 23 Juni tahun 2013, organisasi *Yūai Heiwa no Kaze* (Angin Persaudaraan Damai) dan Aoyama Gakuin University Research Institute mensponsori pertemuan dialog tentang bentuk bangsa yang diikuti oleh 90 orang, termasuk dari kedua kubu revisionis dan penentang amandemen. Surat kabar Kristen *Kurisuchan Shinbun* dan *Kirishito Shinbun* mengadakan simposium darurat bertema "Ke mana Negara Ini Pergi?" di Universitas Meiji Gakuin, Tokyo, yang dihadiri sekitar 150 peserta. Jumlah ini lebih banyak daripada kapasitas ruang pertemuan, menunjukkan bahwa respon terhadap simposium melebihi harapan penyelenggara. Lihat Kirisutokyō Nenkan Hensyūbu, ed., *Kirisutokyō Nenkan 2014* (Tokyo: Kirisuto Shinbun-sha, 2013), 10-16.

¹² Neda, "Maegaki," 4-5.

¹³ Konstitusi 1947 dapat diakses di <https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html> (bahasa Jepang) dan di https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076a_e/076a_etx.html (bahasa Inggris). Draf 2012 dapat dilihat di https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf.

Draf 2012:

- (1) [Karena] mendambakan dengan tulus perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, [maka] rakyat Jepang membuang perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan tidak akan menggunakan ancaman dan penggunaan kekuatan senjata sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional.
- (2) Ketentuan pada ayat di atas *tidak menghalangi* penggunaan hak untuk membela diri.

Di bawah Konstitusi 1947, Jepang harus berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara selain aksi militer. Ayat kedua memperkuat komitmen pasifis ini dengan menolak hak untuk memiliki angkatan bersenjata. Namun, draf amandemen menghilangkan kata “untuk selama-lamanya” pada ayat pertama, dan mengubah arti ayat kedua dengan memunculkan peluang penggunaan kekuatan senjata atas nama hak membela diri. Draf 2012 juga menghapus kalimat yang menyatakan komitmen tidak akan memiliki segala bentuk kekuatan perang.

Orang-orang Kristen juga mencermati upaya untuk merevisi pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan, khususnya Pasal 20. Teks konstitusi saat ini dan usulan revisi berbunyi demikian (terjemahan tidak resmi, penekanan ditambahkan):

Konstitusi 1947:

- (1) Kebebasan beragama dijamin *untuk semua*. Tidak ada organisasi keagamaan yang dapat menerima suatu hak istimewa dari Negara, *atau menjalankan otoritas politik apa pun*.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengambil bagian dalam tindakan, perayaan, upacara, atau praktik keagamaan apa pun.
- (3) Negara dan organ-organnya harus menahan diri dari pendidikan agama atau kegiatan keagamaan lainnya.

Draf 2012:

- (1) Kebebasan beragama dijamin. Negara tidak memberikan hak istimewa kepada organisasi keagamaan mana pun.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengambil bagian dalam tindakan, perayaan, ritual, atau praktik keagamaan apa pun.
- (3) Negara, pemerintah daerah dan badan publik lainnya harus menahan diri dari pendidikan agama tertentu dan kegiatan keagamaan lainnya. *Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk kegiatan yang tidak melebihi yang tercakup dalam ritual sosial atau praktik adat-istiadat.*

Di ayat pertama, Draf 2012 menghilangkan frasa “untuk semua” dan melemahkan larangan terkait hak istimewa bagi suatu organisasi keagamaan dengan menghilangkan kalimat “atau menjalankan otoritas politik apa pun” di ayat pertama. Draf 2012 juga melemahkan ketentuan ayat ketiga dengan mengecualikan aktivitas keagamaan yang dapat diklasifikasikan sebagai “ritual sosial atau praktik adat-istiadat.” Bagi para penentang gerakan amandemen, frase tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk memperlakukan ibadah di kuil sebagai sekadar ritual sosial, bukan tindakan keagamaan.

Bagian berikut akan meneliti pandangan beberapa tokoh kaum Injili menanggapi Draf 2012, dan bagaimana mereka berusaha mendorong orang Kristen lain untuk mengatasi kecenderungan menghindari partisipasi politik.¹⁴

¹⁴ Walaupun artikel ini berfokus pada tanggapan Kristen terhadap Draf 2012, perlu dicatat bahwa jauh sebelum keluarnya Draf 2012, beberapa orang Kristen Jepang telah terlibat dalam gerakan untuk mempertahankan Pasal 9, memprotes praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

a. Watanabe Nobuo

Watanabe Nobuo (1923-2020) adalah seorang pendeta di Gereja Mengaku Tokyo. Gereja ini tergabung dalam denominasi Presbiterian yang bernama Gereja Kristus Jepang. Watanabe memiliki gelar doktor dalam eklesiologi John Calvin dari Universitas Kyoto. Ia telah terlibat dalam gerakan membela Pasal 9 sejak 1950-an. Dalam seminar-seminarnya, Watanabe menyerukan umat Kristen untuk berjuang mempertahankan Pasal 9.

Watanabe menekankan bahwa advokasinya terhadap Pasal 9 tidak didasarkan pada kesesuaian artikel ini dengan ajaran Alkitab, melainkan karena yakin bahwa artikel ini benar, tidak hanya untuk orang Kristen yang percaya pada Alkitab tetapi juga untuk orang-orang bukan Kristen.¹⁵ Ia menyarankan untuk berfokus pada fakta bahwa jika negara-negara di dunia tidak melepaskan hak mereka untuk membentuk kekuatan militer dan berperang, umat manusia akan menghancurkan dirinya sendiri.¹⁶

Dalam pandangan Watanabe, para pemimpin politik di Jepang gagal memahami pentingnya prinsip pemisahan gereja dan negara. Ia menunjukkan bahwa agama sering digunakan untuk membenarkan perang. Bagi Watanabe, upaya untuk merevisi Pasal 20 menunjukkan keinginan terpendam dari elit politik untuk menggunakan agama demi memudahkan mobilisasi rakyat untuk berperang.

Watanabe menegaskan bahwa gereja tidak boleh campur tangan dalam masalah-masalah yang berada di bawah yurisdiksi negara. Namun, gereja bisa saja meminta negara untuk bertobat, terutama dalam situasi di mana negara masuk melanggar wilayah agama demi agenda politiknya. Dia juga berpendapat bahwa kegagalan gereja-gereja Jepang untuk melawan imperialisme dan fasisme di periode Kekaisaran Jepang Agung terkait erat dengan pemahaman iman mereka yang kabur.¹⁷ Karena alasan ini, Watanabe menyarankan bahwa orang Kristen harus mengklarifikasi pemahaman mereka sedemikian rupa sehingga dapat memiliki suatu keyakinan yang memampukan mereka untuk berjuang membela apa yang mereka percaya di dalam hati mereka.¹⁸

Di balik upaya LDP untuk merevisi Pasal 9, Watanabe melihat adanya orang-orang yang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk membuat dan menjual senjata militer berteknologi tinggi.¹⁹ Membuat senjata nuklir dan senjata berteknologi tinggi lainnya, menurut Watanabe, sebenarnya tidak hanya membahayakan negara musuh tetapi juga negara pembuat dan pengguna senjata itu sendiri. Watanabe yakin bahwa Pasal 9 yang menolak penggunaan kekuatan senjata, menunjukkan jalan keluar dari bahaya tersebut. Untuk alasan ini, Watanabe meminta umat Kristen untuk mempertahankan Pasal 9.

terhadap pasal tersebut, dan menuntut pelaksanaan prinsip kebebasan beragama dan prinsip pemisahan agama dan negara. Lihat Tanaka Nobumasa, *Kenpō Kyūjō no Sengoshi* (Tokyo: Iwanami Shoten, 2005), 118-19, 149.

¹⁵ Watanabe Nobuo, "Kenpō Kyū-jō no Seishin-teki Shichū," 31 October 2005, <http://tokyokokuhakurch.world.coocan.jp/kouen/kennpoukyuuounoseishinntekisityuu.html>, diakses 21 Februari 2017.

¹⁶ Menarik untuk diperhatikan bahwa meskipun kebanyakan kaum Calvinis di luar Jepang cenderung mendukung konsep *Justice War* (Perang yang Adil), Watanabe lebih cenderung seperti orang Kristen Jepang pada umumnya yang merupakan pendukung pasifisme. Watanabe menegaskan bahwa umat Kristen harus menolak perang secara mutlak. Baginya, orang Kristen harus rela menanggung ketidakadilan daripada menggunakan kekerasan. Ini bukan berarti sebuah sikap pasif karena orang Kristen juga harus bertindak secara aktif memikirkan jalan keluar demi menciptakan perdamaian yang tidak menggunakan kekerasan.

¹⁷ Watanabe Nobuo, "Daiichi no Haisen to Daini no Haisen: 3.11 kara Miete kita Mono," in *Higashinohon Daishinsai kara Towareru Nihon no Kyōkai*, ed. Shinshū Kaki Senkyō Kōza (Tokyo: Inochi no Kotobasha, 2013), 30, 33.

¹⁸ *Ibid.*, 17.

¹⁹ Watanabe Nobuo, "Sensō Seikan-sha no Heiwa Kenpō Yōgo-ron," 12 August 2004, <http://tokyokokuhakurch.world.coocan.jp/kouen/kouen29.html>, diakses 21 Februari 2017.

Berbeda dengan sebagian besar orang Kristen Jepang saat ini yang tidak memiliki pengalaman perang, sebagai mantan perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang Agung, Watanabe adalah saksi mata kengerian perang. Kesaksiannya membuat argumennya persuasif bagi umat Kristen, selain karena juga berakar kuat pada pemikiran Kristen.

Melalui penjelasannya tentang hak melawan pemerintah, Watanabe memberikan kontribusi yang signifikan bagi kaum Injili dalam meresponi bahaya nasionalisme Jepang. Salah satunya, Ia telah menjadi sumber inspirasi bagi Asaoka Masaru, seorang tokoh Injili yang juga berpartisipasi aktif dalam menentang gerakan amandemen dan masalah-masalah sosial politik lain.²⁰ Namun, ketika menyangkut amandemen yang diusulkan, fokus Watanabe terbatas pada Pasal 9 dan 20. Tokoh berikutnya yang akan kita diskusikan, telah mencoba untuk membahas pasal-pasal yang lain juga.

b. Nishikawa Shigenori

Nishikawa (1927-2020) adalah seorang jurnalis Kristen yang aktif dalam pelayanan gereja, melayani sebagai penatua di Gereja Tokyo dari denominasi Gereja Reformed Jepang dalam kurun waktu yang lama. Ia juga aktif dalam meresponi isu hubungan agama dan negara, khususnya masalah kontroversi mengenai penyembahan perdana menteri ke Kuil Yasukuni.²¹

Seperti Watanabe, pada dasarnya Nishikawa menekankan pentingnya mempertahankan Pasal 9 dan 20. Namun, Nishikawa meresponi masalah amandemen dengan cara yang unik dan lebih luas. Selama lima tahun, Januari 2000 hingga April 2005, Ia menghadiri dan mendengarkan semua pertemuan *Kenpo Chōsa-kai* (Komite Investigasi Konstitusi) dari parlemen.²² Nishikawa memberikan serangkaian ceramah tentang konstitusi dan menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan arti setiap artikel dalam Konstitusi 1947.²³ Dia menunjukkan beberapa masalah dalam pendekatan yang dilakukan oleh para politisi Jepang kontemporer terhadap isu amandemen.

Nishikawa menolak seluruh narasi LDP tentang pentingnya merevisi Konstitusi 1947. Baginya, Konstitusi 1947 tidak dipaksakan pemerintah pendudukan sekutu. Sebelum diberlakukan, Konstitusi 1947 telah melalui proses-proses demokratis, seperti pemilu untuk memilih Majelis Rendah dan Majelis Tinggi demi mengetahui kemauan rakyat Jepang.²⁴ Nishikawa juga menunjukkan bahwa isi Konstitusi 1947 bukanlah hal yang baru bagi orang-orang Jepang di masa itu. Pada tahun 1880-an, jauh sebelum pemerintahan pendudukan sekutu dimulai, sekelompok aktivis hak-hak sipil Jepang yang dipimpin oleh Chiba Takusaburō di Itsukaichi, Tokyo, telah mengajukan

²⁰ Asaoka (lahir 1968) adalah pendeta di Gereja Tokumaru, Tokyo, dari denominasi Gereja Kristus Aliansi Jepang. Ia merespons dengan cara yang unik, yaitu dengan menganggap perkembangan politik yang disebutkan di atas sebagai suatu situasi di mana orang Kristen harus “mengaku iman,” situasi yang mirip dengan yang dialami oleh orang-orang Kristen Jerman pada tahun 1930-an. Maka, pada 18 Desember 2012, ia membentuk suatu kelompok Facebook dengan nama “Kami Percaya dan Mengaku” sebagai forum untuk berbagi informasi dan argumen untuk orang-orang Kristen yang memiliki pandangan serupa tentang krisis yang sedang terjadi ini.

²¹ Mengenai masalah Yasukuni ini dan respons Nishikawa terhadap isu ini, lihat Surya Harefa, “Yasukuni Shrine, Japanese Christian Responses, and a Kuyperian Ecclesiological Perspective,” *Unio Cum Christo* 7, no. 1 (April 2021): 95-111.

²² Nishikawa Shigenori, *Watashitachi no Kenpō: Zenbun kara Dai 103-jō made* (Tokyo: Inochi no Kotobasha, 2005), 3.

²³ Walaupun karya ini terbit pada tahun 2005 sebagai respons terhadap draf amandemen yang dipublikasikan oleh LDP pada tahun 2005, argumen-argumennya valid untuk mengevaluasi Draft 2012 juga.

²⁴ Nishikawa, *Watashitachi no Kenpō*, 112-13. Pemilu Majelis Rendah diadakan pada 10 April 1946 (tujuh bulan sebelum berlakunya Konstitusi 1947) dan 25 April 1947 (satu bulan sebelum Konstitusi 1947 berlaku); Pemilu Majelis Tinggi dilaksanakan pada tanggal 20 April 1947.

rancangan yang memiliki kemiripan dengan konstitusi yang diajukan oleh pemerintah pendudukan sekutu.²⁵

Mengingat pentingnya fakta-fakta sejarah ini, Nishikawa mendorong umat Kristen untuk mempelajari sejarah agar dapat melihat bagaimana pemerintah Jepang selama periode Kekaisaran Jepang Agung telah melanggar prinsip kebebasan beragama dengan mempropagandakan *Tennō-sei* (sistem kaisar) dan ideologi yang dikemudian hari disebut *Kokka Shinto* (Shinto Negara).²⁶ Pemerintah menindas agama Kristen dan Budha, dan memaksa masyarakat untuk beribadah di kuil Shinto, khususnya Kuil Yasukuni.²⁷ Pemerintah waktu itu juga melanggar prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, serta kebebasan pers, dengan mengatasnamakan “demi kaisar dan negara.”²⁸

Itu sebabnya, dalam pandangan Nishikawa, mempelajari sejarah, khususnya hal-hal buruk yang terjadi baik di Jepang maupun negara-negara Asia lainnya pada masa Kekaisaran Jepang Agung, akan membantu umat Kristen Jepang untuk memahami bahaya dari gerakan dan klaim kaum konservatif yang berjuang memulihkan beberapa kondisi Jepang di periode Kekaisaran Jepang Agung. Kesadaran sejarah ini juga akan meningkatkan partisipasi umat Kristen Jepang dalam meresponi masalah-masalah politik yang menjadi rumit karena terkait dengan isu nasionalisme.²⁹

Dedikasi Nishikawa dalam menghadiri semua pertemuan Komite Investigasi Konstitusi sangatlah unik. Di satu sisi, hal itu memungkinkannya untuk memberikan penjelasan yang hidup tentang gerakan untuk mengubah konstitusi dalam parlemen, dan juga memberikan bobot ekstra pada argumennya. Di sisi lain, akan sulit bagi orang Kristen lain untuk melanjutkan pendekatannya tersebut.

c. Sasakawa Norikatsu

Sasakawa (lahir 1940) adalah mantan profesor hukum di Universitas Meiji, Tokyo. Seperti Watanabe dan Nishikawa, Ia menentang revisi Pasal 9.³⁰ Selanjutnya, Ia mengkritik Draf 2012 sebagai perusakan sistem ketatanegaraan. Karena LDP merupakan partai berkuasa, maka LDP dapat dikatakan sebagai bagian dari pemerintah. Oleh karena itu, para politisi LDP seyogianya berkewajiban untuk menghormati dan mempertahankan konstitusi yang berlaku. Konstitusi 1947 menjamin hak individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Namun, LDP justru berupaya merevisi pasal-pasal yang membatasi wewenang pemerintah dan membuka peluang bagi pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya secara lebih leluasa.³¹

Sasakawa juga menyoroti suatu masalah dalam pengaturan sistem kekaisaran di Draft 2012. Draf ini memang tidak mengusulkan untuk kembali sepenuhnya kepada sistem kekaisaran pada periode Kekaisaran Jepang Agung, karena tetap membatasi peran kaisar. Namun, menurut Sasakawa, pembatasan tersebut menjadi kurang berarti karena pada saat yang sama draf tersebut juga menyatakan kaisar sebagai kepala negara dan memperbolehkan kaisar terlibat dalam organisasi pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengaturan yang tegas mengenai batas bagi perluasan peran kaisar.³²

²⁵ Ibid., 50-51.

²⁶ Sistem kekaisaran di periode ini menempatkan kaisar sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan rakyat sebagai bawahan yang tunduk sepenuhnya kepada kaisar. Untuk mendukung sistem ini, pemerintah menggunakan beberapa konsep dan ritual Shinto yang kemudian diidentifikasi sebagai ideologi negara yang non religius dan berada di atas segala agama.

²⁷ Ibid., 29.

²⁸ Ibid., 30.

²⁹ Ibid., 29.

³⁰ Sasakawa Norikatsu, "Jimintō 'Kenpō Kaisei Sōan' no Bunseki: Omoni Ten'nōsei ni Sokushite," *Hōritsu Ronsō* 87, no. 6 (March 2015): 57.

³¹ Ibid., 58, 88.

³² Ibid., 88.

Draf 2012 juga berbeda dengan Konstitusi 1947 dalam memahami konsep kedaulatan rakyat. Kalimat pertama pembukaan berbunyi sebagai berikut (terjemahan tidak resmi, penekanan ditambahkan):

Konstitusi 1947:

Kami, rakyat Jepang, bertindak melalui perwakilan kami yang terpilih di dalam Parlemen, bertekad bahwa kami akan mengamankan untuk diri dan keturunan kami buah dari kerja sama damai dengan semua bangsa dan berkah kebebasan di seluruh negeri ini, dan memutuskan bahwa tidak akan pernah lagi kami dikunjungi kengerian perang melalui tindakan pemerintah, menyatakan bahwa kuasa kedaulatan berada di tangan rakyat dan benar-benar menegakkan Konstitusi ini.

Draf 2012:

Jepang adalah negara dengan sejarah yang panjang dan budaya yang unik, *menerima* kaisar sebagai simbol persatuan rakyat, diperintah berdasar pemisahan kekuasaan legislatif, administratif dan yudikatif yang tunduk pada kedaulatan rakyat.

Alih-alih mengakui rakyat Jepang sebagai subyek yang berdaulat atas negara, Draf 2012 menyatakan bahwa negara menerima kaisar terlepas dari persetujuan rakyat.³³ Dengan cara ini, Draf 2012 melemahkan konsep bahwa negara adalah milik rakyat.³⁴

Sasakawa juga mengkritik kecenderungan Draf 2012 untuk membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan hati nurani dalam pengaturan tentang bendera dan lagu kebangsaan, pembentukan sistem kalender kekaisaran berdasarkan tahun pemerintahan kaisar, dan penggunaan frase “kepentingan publik dan ketertiban publik” sebagai batasan kebebasan. Dia menambahkan bahwa draf tersebut merusak prinsip pemisahan gereja dan negara, sehingga membuka jalan bagi perdana menteri, anggota kabinet, dan anggota parlemen untuk melakukan penyembahan dalam kapasitas sebagai pejabat publik di kuil-kuil Shinto.³⁵

Sasakawa memperingatkan bahwa Draf 2012, jika diberlakukan, dapat sangat berpengaruh negatif bagi umat Kristen di Jepang. Meskipun tidak ada pasal yang membatasi fungsi gereja secara langsung, sejarah menunjukkan bahwa sistem kaisar, dengan ritual penyembahan yang bersifat publik di kuil-kuil, akan memiliki konsekuensi negatif. Tidak hanya akan memperkuat kecenderungan untuk menganggap iman hanya sebagai masalah internal,³⁶ draf ini bila disetujui akan mengakibatkan terjadinya bentrokan antara kebijakan pemerintah dan kepercayaan orang Kristen, yang menganggap penyembahan di kuil agama lain sebagai penyembahan berhala.³⁷

Sebagai guru besar hukum, Sasakawa telah mendedikasikan keahliannya dalam meresponi isu amandemen. Ia telah dengan berani dan jelas menangani masalah sensitif mengenai sistem kaisar dan dengan terang menyingkapkan nada nasionalisme yang cenderung bersifat fasis dari amandemen yang diusulkan. Namun, seperti Watanabe dan Nishikawa, ia belum menawarkan solusi terhadap kebuntuan antara kubu pendukung dan penentang amandemen.

³³ Ibid., 76.

³⁴ Ibid., 95.

³⁵ Ibid., 89.

³⁶ Ibid., 90.

³⁷ Ibid., 91.

d. Inagaki Hisakazu

Inagaki (lahir tahun 1947) adalah profesor filsafat Kristen di Tokyo Christian University. Seperti Nishikawa dan Sasakawa, ia memandang gerakan amandemen sebagai upaya untuk membuat penyembahan publik di kuil Yasukuni diperbolehkan oleh konstitusi dan untuk memungkinkan pemerintah menekan mereka yang memiliki pendapat atau posisi berbeda dengan alasan “demi kepentingan publik dan ketertiban publik.” Dengan membangkitkan kembali sistem kaisar yang lebih kuat, demikian Inagaki yakin, pemerintah berusaha menumbuhkan suatu nasionalisme yang mempermudah pemerintah dalam memobilisasi rakyat Jepang.³⁸

Inagaki melangkah lebih jauh dari ketiga tokoh yang telah dibahas di atas. Ia membahas ketidakpedulian orang Kristen Injili terhadap isu amandemen ini serta isu-isu lain yang juga saling terkait dengan masalah nasionalisme. Bagi Inagaki, ketidakpedulian orang Kristen diakibatkan oleh ketiadaan wawasan dunia Kristen (*Christian worldview*) yang kuat dan dipahami dengan baik. Tanpa wawasan seperti itu, orang Kristen tidak akan memiliki kepedulian yang dibutuhkan untuk keterlibatan sosial dan tidak diperlengkapi untuk menghadapi isu yang rumit seperti masalah amandemen konstitusi. Tema ini membutuhkan pemahaman tentang sejarah, ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, dan agama.³⁹ Konsep wawasan dunia akan membantu seseorang untuk tidak hanya membahas level permukaan tetapi juga untuk menggali lebih dalam dan menyelidiki pemikiran-pemikiran yang implisit dan saling bertabrakan.

Inagaki juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dengan seksama.⁴⁰ Setelah menunjukkan bahaya dari frase “kepentingan publik dan ketertiban publik” di dalam Draf 2012, Ia mengkontraskannya dengan konsep “kesejahteraan publik” dalam Pasal 12 dan 13 yang mengatur tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, dan dalam Pasal 29 yang memberi otorisasi hak kepemilikan. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut (terjemahan tidak resmi, penekanan ditambahkan):

Pasal 12:

Konstitusi 1947:

Kebebasan dan hak-hak yang dijamin bagi rakyat oleh Konstitusi ini harus dipertahankan dengan usaha rakyat yang terus menerus, yang harus menahan diri dari penyalahgunaan kebebasan dan hak-hak ini dan harus selalu bertanggung jawab untuk menggunakannya bagi *kesejahteraan publik*.

Draf 2012:

Kebebasan dan hak-hak yang dijamin bagi rakyat oleh Konstitusi ini harus dipertahankan oleh usaha rakyat yang terus-menerus. Rakyat harus harus menahan diri dari penyalahgunaan kebebasan dan hak-hak ini, harus menyadari fakta bahwa ada tanggung jawab dan kewajiban yang menyertai kebebasan dan hak-hak ini, dan tidak boleh melanggar *kepentingan publik dan ketertiban publik*.

Pasal 13:

³⁸ Inagaki Hisakazu, *Kaiken Mondai to Kirisutokyō* (Tokyo: Kyobunkwan, 2014), 51.

³⁹ Ibid., 8. Lihat juga Inagaki Hisakazu, “Kirisutokyō Sekaikan kara no Nihon Shingaku no Saihensei,” *Kirisuto to Sekai* 24 (March 2014): 140–4.

⁴⁰ Inagaki, *Kaiken Mondai*, 9, 29–30, 32.

Konstitusi 1947:

Semua orang harus dihormati sebagai individu. Hak mereka atas hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, sepanjang tidak mengganggu *kesejahteraan publik*, menjadi pertimbangan tertinggi dalam undang-undang dan urusan pemerintahan lainnya.

Draf 2012:

Semua orang harus dihormati sebagai manusia. Hak mereka atas hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, sepanjang tidak mengganggu *kepentingan publik dan ketertiban publik*, menjadi pertimbangan tertinggi dalam undang-undang dan urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 29.2:

Konstitusi 1947:

Hak kepemilikan harus ditentukan oleh hukum, di dalam kesesuaian dengan *kesejahteraan publik*.

Draf 2012:

Hak kepemilikan harus ditentukan oleh hukum, di dalam kesesuaian dengan *kepentingan publik dan ketertiban publik*. Dalam hal ini, hak atas kekayaan intelektual perlu dipertimbangkan untuk berkontribusi bagi peningkatan kreativitas intelektual rakyat.

Draf 2012 mengusulkan perubahan istilah *kōkyō fukushi* (kesejahteraan publik) dalam ketiga pasal di atas menjadi *kōeki oyobi kō no chitsujo* (kepentingan publik dan ketertiban publik). Inagaki memperingatkan bahwa, sementara istilah *kō* dalam Draf 2012 merujuk kepada pemerintah, istilah *kōkyō* dalam Konstitusi 1947 mengacu kepada semua orang di seluruh lapisan masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu, di amandemen yang diusulkan, adalah pemerintah, bukan rakyat, yang berhak mendefinisikan kepentingan publik dan ketertiban publik. Pemahaman tentang “publik” seperti ini bisa mengarah pada pemerintahan otoriter, seperti yang terjadi pada masa Kekaisaran Jepang Agung.

Konsep kesejahteraan publik, walaupun diulang beberapa kali dalam Konstitusi 1947, menurut Inagaki belum diterapkan secara optimal oleh masyarakat Jepang. Maka, ia mendorong gereja-gereja untuk berinisiatif menerapkan konsep kesejahteraan publik dengan menggunakan potensi yang ada sebagai suatu komunitas di dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam mempromosikan prinsip dan praktik kesejahteraan publik.⁴²

Inagaki mendesak umat Kristen untuk bekerja sama dengan orang bukan Kristen dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, ia menyarankan penggunaan konsep, anugerah umum (*common grace*) dan kedaulatan ruang lingkup (*sphere sovereignty*) seperti yang diartikulasikan oleh Abraham Kuyper. Dengan pendekatan Kuyperian, Inagaki yakin kaum Injili dapat melanjutkan dan mengembangkan partisipasi sosial politik. Ia percaya bahwa mewujudkan masyarakat sipil dengan cara ini dapat membantu masyarakat Jepang dalam menemukan solusi bagi berbagai masalah sosial-politik yang mengalami kebuntuan akibat perbedaan besar antara pandangan kaum

⁴¹ Ibid., 30.

⁴² Ibid., 45–47. Inagaki menjelaskan bahwa penyisipan frase “tanggung jawab keluarga” di Draft 2012 dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab kesejahteraan dari negara ke keluarga. Ia juga menekankan pentingnya kebebasan berserikat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil (ibid., 30, 32, 44).

konservatif dan liberal, termasuk dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan isu nasionalisme yang cenderung bersifat fasis seperti isu amandemen yang dibahas di artikel ini.⁴³

Perlu dicatat bahwa ada orang-orang bukan Kristen yang telah menunjukkan minat pada pendekatan Kuyperian yang dikemukakan oleh Inagaki. Sarannya untuk mengembangkan *kōkyō tetsugaku* (filsafat publik) dan *kōkyō fukushi* (kesejahteraan publik), yang juga berkaitan dengan penelitiannya tentang Kagawa Toyohiko (1888-1960),⁴⁴ pendiri beberapa *co-operatives* (koperasi)⁴⁵ di Jepang, yaitu koperasi konsumen, pertanian, dan perikanan, telah membuka jalan baginya untuk terlibat dengan para sarjana di bidang filsafat publik dan kesejahteraan masyarakat, serta pemimpin beberapa koperasi. Selain menerbitkan karyanya melalui berbagai penerbit non-Kristen,⁴⁶ Inagaki dalam beberapa kesempatan juga mengkoordinasikan Simposium Kagawa, yang melibatkan orang-orang bukan Kristen juga.⁴⁷

IV. Kesimpulan

Meskipun kaum Injili di Jepang hanya berjumlah sedikit dan memiliki kecenderungan untuk menghindari partisipasi di bidang sosial politik, beberapa orang Kristen Jepang telah menghasilkan berbagai gerakan dan argumen sebagai tanggapan atas gerakan amandemen. Keempat tokoh yang dibahas di artikel ini menerapkan kemampuan profesi yang berbeda-beda—sebagai pendeta, jurnalis, profesor hukum, dan profesor filsafat—untuk melawan gerakan amandemen dan untuk meningkatkan kesadaran kaum Injili tentang potensi bahaya yang inheren di dalam gerakan amandemen.

Sebagai poin evaluasi yang pertama, penulis berpendapat bahwa respons Inagaki patut mendapat perhatian khusus. Seperti yang telah kita lihat, para pendukung gerakan amandemen telah berjuang tanpa menyerah sejak tahun 1955. Mereka dapat disebut sebagai *kaiken-ha* (kubu revisionis) dan mendapat perlawanan yang kukuh dari *goken-ha* (kubu penjaga). Posisi kedua kubu bertentangan sedemikian rupa sehingga masalah amandemen bisa dikatakan selalu mengalami kebuntuan. Dari perspektif ini, usulan Inagaki tentang *katsuken* (memanfaatkan isi Konstitusi 1947, khususnya yang berkaitan dengan konsep kesejahteraan publik) demi pembangunan masyarakat sipil Jepang dapat disebut sebagai suatu jalan keluar dari kebuntuan.

Setidaknya, bagi kubu *goken*, ide *katsuken* dari Inagaki menyediakan suatu cara alternatif dalam meresponi isu ini selain dari hanya memprotes kubu *kaiken-ha*. Jika gerakan protes dapat diklasifikasikan sebagai tindakan negatif, maka membangun masyarakat sipil berdasarkan konsep kesejahteraan publik dapat dilihat sebagai

⁴³ Ibid., 33–34.

⁴⁴ Sebagai seorang aktivis sosial Kristen, Kagawa berusaha menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam mereformasi masyarakat. Ia terkenal karena tekadnya untuk membantu kaum miskin dengan pindah ke daerah kumuh selama masa studinya di Kobe Theological Seminary. Ia juga seorang aktivis gerakan perdamaian.

⁴⁵ Koperasi di sini merujuk pada badan usaha yang dimiliki bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama.

⁴⁶ Contohnya, *Shūkyō to Kōkyō Tetsugaku: Seikatsu sekai no Supirichuariti* (Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 2004); *Kokka, Kojin, Shūkyō: Kingendai Nihon-no Seishin* (Tokyo: Kōdansha, 2007); *Jissen no Kōkyō Tetsugaku: Fukushi, Kagaku, Shūkyō* (Shunjūsha, 2013); *Kōkyō Fukushi to iu Kokoromi: Fukushi Kokka kara Fukushi Shakai e* (Tokyo: Chūō Hōki Shuppan, 2015); Ōsawa Masachi and Inagaki Hisakazu, *Kirisutokyō to Kindai no Meikyū* (Tokyo: Shunjūsha, 2018); “Nihon ni Sanka-gata Mishushugi o Tsukuru,” *Kyōdō Kumiai Kenkyū-shi Niji*, no. 63 (Spring 2018): 2–12; “*Hatarakukoto*” *no tetsugaku: Dī-sento wa-ku to wa nanika* (Tokyo: Akashi Shoten, 2019).

⁴⁷ Simposium-simposium tersebut dilaksanakan pada 14 Maret 2015, 29 Oktober 2016, 11 November 2017, 10 November 2018, dan 9 November 2019.

tindakan positif. Seperti telah disinggung di atas, gagasan Inagaki mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang aktif di bidang kesejahteraan masyarakat dan koperasi. Ini adalah perkembangan menarik yang berharga untuk ditindaklanjuti oleh kaum Injili di Jepang. Jika gagasan Inagaki dapat memberikan hasil yang terlihat dan positif dalam masyarakat Jepang, bukan tidak mungkin bahwa kubu revisionis akan mempertimbangkan kembali niat mereka untuk mengubah “kesejahteraan publik” menjadi “kepentingan publik dan ketertiban publik.”

Poin evaluasi yang kedua, jika kita membandingkan kehadiran di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan resistensi terhadap gerakan amandemen dengan acara-acara Kristen lainnya, jelas bahwa kepedulian terhadap masalah ini di antara kaum Injili masih rendah.⁴⁸ Seperti yang ditunjukkan Nishikawa, kurangnya kepedulian ini terkait dengan terbatasnya pendidikan sejarah yang diterima oleh orang-orang Jepang di bangku sekolah. Pemerintah Jepang tidak menyediakan buku pelajaran sejarah yang secara jujur merinci apa yang dilakukan pemerintah dan tentara Jepang terhadap negara-negara Asia lainnya selama era Kekaisaran Jepang Agung. Bagi kaum Injili, kondisi tidak adanya pemahaman sejarah yang faktual diperparah dengan belum adanya pemahaman dan implementasi konsep wawasan dunia Kristen, seperti yang dikemukakan oleh Inagaki.

Sebagaimana telah kita lihat, selain konsep wawasan dunia Kristen, Inagaki juga menekankan pentingnya konsep anugerah umum dan konsep kedaulatan ruang lingkup, yang ia dapatkan dari pemikiran-pemikiran Abraham Kuyper. Pada dasarnya penulis setuju dengan pandangan Inagaki karena bagi penulis ketiga konsep Kuyperian tersebut yang membuat gagasan Inagaki lebih komprehensif dari para tokoh Injili yang lain dan berpotensi untuk menghasilkan jalan keluar bagi kebuntuan yang ada pada isu amandemen. Namun demikian, penulis juga melihat pentingnya saran-saran eklesiologis dari Kuyper. Dalam perkembangan penelitian mengenai Kuyper, beberapa sarjana Kuyper dewasa ini mulai menyadari bahwa konsep wawasan dunia, anugerah umum, dan kedaulatan ruang lingkup saling terkait dan bahkan berakar dalam konsep eklesiologis Kuyper.⁴⁹ Mempelajari dan menerapkan saran-saran eklesiologis Kuyper dapat mempermudah pemahaman dan implementasi dari konsep-konsep Kuyperian di atas.

Dalam eklesiologi Kuyper, gereja dilihat sebagai dua aspek yang saling terkait, organisme dan institusi.⁵⁰ Gereja sebagai organisme mengacu pada tubuh mistik Kristus yang menyatukan semua orang percaya dari seluruh abad dan tempat, sedangkan gereja sebagai institusi menandakan suatu organisasi untuk pemberitaan Firman dan pelaksanaan sakramen-sakramen. Gereja sebagai institusi memperlengkapi orang-orang percaya sehingga dapat membawa cahaya ke luar institusi gereja. Kedua fungsi ini, mengumpulkan dan mengirim, harus ada secara simultan dan

⁴⁸ Bdk. Kirisutokyō Nenkan Hensyūbu, ed., *Kirisutokyō Nenkan 2014 [Christian Year Book]* (Tokyo: Kirisuto Shinbun-sha, 2013), 14–15. Contohnya, ada 280 peserta di seminar peringatan 450 tahun Katekismus Heidelberg pada 30 September 2013 dan 150 orang di upacara dedikasi gedung gereja baru dari Gereja Fujimi di Tokyo pada 27 Oktober 2013. Kontrasnya lebih besar jika kita membandingkan dengan acara Makan Malam Natal yang diselenggarakan oleh International VIP Club di Hotel New Otani Tokyo pada 26 November 2013, dengan 300 peserta, atau upacara peringatan ulang tahun ke-100 Universitas Sophia pada 1 November 2013, yang dihadiri 4.200 orang.

⁴⁹ John H. Wood Jr., *Going Dutch in the Modern Age: Abraham Kuyper's Struggle for a Free Church in the Netherlands* (New York: Oxford University Press, 2013), 174; James D. Bratt, *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat* (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), 172.

⁵⁰ Abraham Kuyper, “Rooted and Grounded (1870),” in *On The Church*, ed. John H. Wood Jr. and Andrew M. McGinnis, trans. Nelson D. Kloosterman et al. (Bellingham: Lexham, 2016), 54–57; Abraham Kuyper, *Lectures on Calvinism [1898]* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 59–62.

berkesinambungan.⁵¹ Pemahaman eklesiologis seperti ini dapat menjadi panduan bagi kaum Injili dalam mengatasi kecenderungan menarik diri dari partisipasi sosial politik tanpa menjadi seperti kaum Kristen liberal, yang dalam pandangan kebanyakan kaum Injili telah secara aktif berpartisipasi dalam masalah sosial-politik tetapi dengan mengkompromikan pokok-pokok iman dan jati diri gereja.⁵²

Kuyper juga menekankan pentingnya gereja untuk selalu berada dalam kondisi independen terhadap negara. Dengan menggunakan slogan “gereja yang bebas di negara yang bebas,” ia menegaskan bahwa gereja institusi harus menghindari baik mengintervensi atau dintervensi oleh negara. Kuyper percaya bahwa cara terbaik untuk berkembang maju bagi gereja dan negara adalah dengan membiarkan keduanya saling memisahkan diri dan saling menghormati.⁵³ Prinsip ini dapat membantu gereja-gereja Injili dalam menjaga diri dari perangkap yang mereka alami pada periode Kekaisaran Jepang Agung, ketika mereka membiarkan diri mereka diintervensi oleh negara. Selain itu, prinsip ini mungkin dapat juga menjadi petunjuk bagi kubu revisionis untuk tidak lagi berupaya memulihkan keterlekatan Shinto dengan negara. Dengan demikian, saran eklesiologis Kuyper dapat membantu negara Jepang dalam menghormati keberadaan agama-agama dan menghindari penyalahgunaan agama demi kepentingan politik.

Akhir kata, penulis melihat bahwa kedua saran eklesiologis Kuyper di atas, yaitu agar membedakan gereja sebagai organisme dan institusi, dan agar selalu menjaga independensi gereja terhadap negara, dapat bermanfaat bagi konteks Indonesia yang menghadapi masalah politisasi agama. Besar harapan penulis ada peneliti yang mengembangkan penelitian untuk mengevaluasi berbagai respons kaum Injili di Indonesia terhadap masalah yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan negara dan kemudian memikirkan kelanjutan partisipasi kaum Injili dalam masalah-masalah tersebut dengan bantuan dari saran-saran eklesiologis Kuyper.

⁵¹ Ad de Bruijne, “‘Colony of Heaven’: Abraham Kuyper’s Ecclesiology in the Twenty-First Century,” *Journal for Markets and Morality* 17, no. 2 (2014): 464–65; Ad de Bruijne, “Not without the Church as Institute: The Relevance of Abraham Kuyper’s Ecclesiology for Christian Public and Theological Responsibilities in the Twenty-First Century,” in *The Kuyper Center Review, Vol. 5: Church and Academy*, ed. Gordon Graham (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 77–78; Michael R. Wagenman, “Abraham Kuyper and the Church: From Calvin to the Neo-Calvinists,” in *On Kuyper: A Collection of Readings on the Life, Work and Legacy of Abraham Kuyper*, ed. Steve Bishop and John H. Kok (Sioux Center: Dordt College Press, 2013), 137.

⁵² Untuk diskusi lebih mendetail mengenai kedua aspek gereja di dalam pemikiran Kuyper lihat Surya Harefa, “First Rooted, Then Grounded: The Position of The Church Institution in Kuyper’s Ecclesiology,” *Verbum Christi* 7, no. 1 (April 2020): 39–40.

⁵³ Kuyper, “Rooted and Grounded,” 68; Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 99, 104, 106, 108.

V. Referensi

- Bevans, Stephen B. *Models of Contextual Theology*. Maryknoll: Orbis, 1992.
- Bratt, James D. *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat*. Grand Rapids: Eerdmans, 2013.
- Bruijne, Ad de. "Colony of Heaven': Abraham Kuyper's Ecclesiology in the Twenty-First Century." *Journal for Markets and Morality* 17, no. 2 (2014): 445–90.
- . "Not without the Church as Institute: The Relevance of Abraham Kuyper's Ecclesiology for Christian Public and Theological Responsibilities in the Twenty-First Century." In *The Kuyper Center Review, Vol. 5: Church and Academy*, edited by Gordon Graham. Grand Rapids: Eerdmans, 2015.
- Harefa, Surya. "First Rooted, Then Grounded: The Position of The Church Institution in Kuyper's Ecclesiology." *Verbum Christi* 7, no. 1 (April 2020): 25–40.
- . "Resistance to Japanese Nationalism: Christian Responses to Proposed Constitutional Amendments in Japan." *Evangelical Review of Theology* 43, no. 4 (October 2019): 330–44.
- . "Yasukuni Shrine, Japanese Christian Responses, and a Kuyperian Ecclesiological Perspective." *Unio Cum Christo* 7, no. 1 (April 2021): 95–111.
- Hiebert, Paul G. *Anthropological Insights for Missionaries*. Grand Rapids: Baker, 1986.
- Inagaki Hisakazu. "Hatarakukoto" no tetsugaku: *Dī-sento wa-ku to wa nanika*. Tokyo: Akashi Shoten, 2019.
- . *Jissen no Kōkyō Tetsugaku: Fukushi, Kagaku, Shūkyō*. Shunjūsha, 2013.
- . *Kaiken Mondai to Kirisutokyō*. Tokyo: Kyobunkwan, 2014.
- . "Kirisutokyō Sekaikan kara no Nihon Shingaku no Saihensei." *Kirisuto to Sekai [Christ and the World]* 24 (March 2014): 140–64.
- . *Kokka, Kojin, Shūkyō: Kingendai Nihon-no Seishin*. Tokyo: Kōdansha, 2007.
- . *Kōkyō Fukushi to iu Kokoromi: Fukushi Kokka kara Fukushi Shakai e*. Tokyo: Chūō Hōki Shuppan, 2015.
- . "Nihon ni Sanka-gata Mishushugi o Tsukuru." *Kyōdō Kumiai Kenkyū-shi Niji*, no. 63 (Spring 2018): 2–12.
- . *Shūkyō to Kōkyō Tetsugaku: Seikatsu sekai no Supirichuariti*. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 2004.
- Kirisutokyō Nenkan Hensyūbu, ed. *Kirisutokyō Nenkan 2014*. Tokyo: Kirisuto Shinbunsha, 2013.
- Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism [1898]*. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.
- . "Rooted and Grounded (1870)." In *On The Church*, edited by John H. Wood Jr. and Andrew M. McGinnis, translated by Nelson D. Kloosterman, Harry Van Dyke, Nelson D. Kloosterman, Todd M. Rester, and Arjen Vreugdenhil, 42–73. Bellingham: Lexham, 2016.
- Neda Shōichi. "Maegaki." In *Kurisuchan Toshite "Kenpō" wo Kangaeru*, edited by Kurisuchan Shinbun, by Asaoka Masaru, Kataoka Terumi, Naitō Shingo, Che Son-e, Okada Akira, Yohena Chōshū, and Tsuboi Setsuko, 3–6. Tokyo: Inochi no Kotobasha, 2013.
- Nishikawa Shigenori. *Watashitachi no Kenpō: Zenbun kara Dai 103-jō made*. Tokyo: Inochi no Kotobasha, 2005.
- Ōsawa Masachi, and Inagaki Hisakazu. *Kirisutokyō to Kindai no Meikyū*. Tokyo: Shunjūsha, 2018.
- Sasakawa Norikatsu. "Jimintō 'Kenpō Kaisei Sōan' no Bunseki: Omoni Ten'nōsei ni Sokushite." *Hōritsu Ronsō [Law Journal]* 87, no. 6 (March 2015): 51–97.
- Tanaka Nobumasa. *Kenpō Kyūjō no Sengoshi*. Tokyo: Iwanami Shoten, 2005.

- Toren, Benno van den. "Intercultural Theology as Three-Way Conversation: Beyond the Western Dominance of Intercultural Theology." *Exchange* 44, no. 2 (2015): 123–43.
- Wagenman, Michael R. "Abraham Kuyper and the Church: From Calvin to the Neo-Calvinists." In *On Kuyper: A Collection of Readings on the Life, Work and Legacy of Abraham Kuyper*, edited by Steve Bishop and John H. Kok, 125–39. Sioux Center: Dordt College Press, 2013.
- Walls, Andrew F. "The Ephesian Movement: At a Crossroads in Christian History." In *The Cross-Cultural Process in Christian History: Studies in The Transmission and Appropriation of Faith*. Maryknoll: Orbis, 2002.
- Watanabe Nobuo. "Daiichi no Haisen to Daini no Haisen: 3.11 kara Miete kita Mono." In *Higashinohon Daishinsai kara Towareru Nihon no Kyōkai*, edited by Shinshū Kaki Senkyō Kōza, 9–34. Tokyo: Inochi no Kotobasha, 2013.
- . "Kenpō Kyū-jō no Seishin-teki Shichū." Presented at the Tokyo Kokuhaku Kyōkai Shūkyō Kaikaku Kinen Kōkai Kōen-kai, Tokyo, October 31, 2005.
<http://tokyokokuhakuchurch.world.coocan.jp/kouen/kennpoukyuuounoseishin ntekisityuu.html>. Diakses 4 April 2019.
- . "Sensō Seikan-sha no Heiwa Kenpō Yōgo-ron." Presented at the Tokyo Kokuhaku Kyōkai Heiwa Kōen-kai, Tokyo, August 12, 2004.
<http://tokyokokuhakuchurch.world.coocan.jp/kouen/kouen29.html>. Diakses 4 April 2019.
- Wood, John H., Jr. *Going Dutch in the Modern Age: Abraham Kuyper's Struggle for a Free Church in the Netherlands*. New York: Oxford University Press, 2013.
- "LDP Announces a New Draft Constitution for Japan." *Jimintō*. www.jimin.jp/english/news/117099.html. Diakses 21 Februari 2017.